Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 607-613 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Peran Indonesia dalam mewujudkan solidaritas global: Sejarah keterlibatan dalam gerakan non-blok

Haidar Muchammad[1], Fayyadhoh tahta alfina[2], Vita Yulia[3], Hilmi Maubarok[4]
[1234]Program Studi Pendidikan Ilmu penegetahuan soasial, Universitas Islam Negeri Maualana Malik Ibrahim Malang
e-mail: haidarmuhammad085@gmail.com[1], fayya.alfina1310@gmail.com[2], lutfihilmi170@gmail.com[3], vitayulia097@gmail.com[4]

Kata Kunci:
Nonblok, solidaritas, diplomasi, Indonesia, global.

Keywords:
Non-aligned, solidarity, diplomacy, Indonesia, global

A B S T R A K

Kajian mengenai Tarikh Tasyri' atau sejarah legislasi hukum Islam memiliki peranan penting dalam memahami dinamika perkembangan hukum Islam dari masa kenabian hingga penyebarannya ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Di Indonesia, proses masuknya hukum Islam tidak hanya melalui ekspansi kekuasaan, tetapi juga melalui dakwah kultural, perdagangan, dan pendekatan sosial yang damai. Hal ini memungkinkan nilai-nilai Islam melebur dalam struktur sosial masyarakat yang multikultural dan religius-plural. Artikel ini mengulas bagaimana hukum Islam diterima, disesuaikan, dan diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, serta keyakinan. Dalam masyarakat yang tidak homogen secara agama, hukum Islam tetap menemukan relevansinya melalui mekanisme asimilasi dengan norma adat dan peraturan negara. Selain itu, pembentukan hukum Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan transformasi sistem hukum nasional yang terjadi setelahnya. Artikel ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk melihat bagaimana hukum Islam tetap bertahan dan berkembang di tengah pluralitas, tanpa kehilangan esensinya. Penulis menyoroti bahwa fleksibilitas hukum Islam, baik dalam aspek substansi maupun penerapannya, menjadi faktor kunci keberlangsungannya dalam masyarakat yang beragam.

A B S T R A C T

The Non-Aligned Movement (NAM) emerged as a response to global polarization during the Cold War, when the world was divided between the Western and Eastern blocs. Many developing countries, including Indonesia, sought to avoid being entangled in ideological conflicts while maintaining their sovereignty and independence in foreign policy. This article addresses the historical and strategic role of Indonesia in the formation and development of the Non-Aligned Movement, as well as its contribution to promoting global solidarity and justice. Employing a qualitative-descriptive approach, this study examines historical sources and relevant literature to analyze Indonesia's involvement, particularly through the 1955 Asian–African Conference and the implementation of its "free and active" foreign policy principle. The findings indicate that Indonesia played a significant role in advancing the values of solidarity, anti-colonialism, and cooperation among developing countries, while also acting as a diplomatic bridge in global politics. In conclusion, the principles and spirit of the Non-Aligned Movement championed by Indonesia remain relevant in addressing contemporary multipolar geopolitical challenges, especially in fostering a more just, inclusive, and balanced global order.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dunia pasca Perang Dunia II mengalami polarisasi yang tajam akibat ketegangan antara dua kekuatan besar: Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Perang Dingin yang berlangsung selama lebih dari empat dekade tidak hanya berdampak pada hubungan negara-negara besar, tetapi juga memengaruhi negara-negara baru yang sedang merintis kemerdekaannya. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan bagi negara-negara yang tidak ingin terseret dalam konflik ideologis tersebut untuk membangun sebuah jalan tengah: jalan yang bebas dari dominasi kekuatan besar, namun tetap aktif memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang baru merdeka pada saat itu, tampil dengan visi politik luar negeri yang khas: bebas dan aktif. Visi ini bukan semata-mata sikap netral, melainkan komitmen aktif dalam mewujudkan dunia yang lebih adil dan setara bagi negara-negara berkembang. Keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (1955) menjadi tonggak awal yang mempertemukan negara-negara dari Asia dan Afrika dalam semangat solidaritas antikolonialisme dan kerja sama global. Dari sinilah akar Gerakan Non-Blok (GNB) tumbuh dan berkembang.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas bagaimana Indonesia memainkan peran strategis dalam membangun solidaritas global melalui GNB, serta menelaah relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks geopolitik kontemporer. Dengan menggali aspek historis dan diplomasi internasional, tulisan ini berharap dapat memberi pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi Indonesia terhadap tatanan dunia yang lebih inklusif dan seimbang.

Pembahasan

Konteks Historis Lahirnya Gerakan Non-Blok

Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, tatanan dunia mengalami perubahan besar yang ditandai dengan munculnya dua kekuatan super yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya mewakili ideologi yang sangat bertolak belakang: kapitalisme dan komunisme. Ketegangan antara dua blok besar ini dikenal sebagai Perang Dingin, yang berlangsung selama beberapa dekade dan membagi dunia menjadi dua kubu yang saling bersaing secara politik, ekonomi, dan militer. Dalam konteks ini, negara-negara baru yang merdeka di Asia dan Afrika dihadapkan pada dilema besar, yakni tekanan untuk memihak salah satu blok. Pilihan tersebut berpotensi mengorbankan kemerdekaan politik mereka dan mengancam prinsip kedaulatan nasional yang baru saja diperoleh.

Indonesia, yang baru saja meraih kemerdekaan pada tahun 1945, bersama dengan sejumlah negara Asia dan Afrika, menyadari perlunya sebuah jalur independen yang memungkinkan mereka untuk menjaga kebebasan politik tanpa terjebak dalam pertarungan ideologi global tersebut. Kesadaran ini memuncak dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara yang sebagian besar merupakan negara baru

merdeka dan belum memihak pada blok manapun. Konferensi Asia-Afrika menjadi momentum penting dalam sejarah dunia karena menegaskan solidaritas di antara negara-negara yang berjuang melawan kolonialisme dan neokolonialisme.

Salah satu hasil utama dari KAA adalah perumusan Dasasila Bandung, yaitu sepuluh prinsip yang menjadi pedoman hubungan internasional bagi negara-negara peserta. Prinsip-prinsip ini meliputi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, penghormatan terhadap hak untuk membela diri, serta kerja sama yang saling menguntungkan (Dewanta, 2018). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi fondasi bagi hubungan bilateral antar negara peserta, tetapi juga membuka jalan bagi pembentukan gerakan yang lebih luas dan formal yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok (GNB).

Gerakan Non-Blok secara resmi lahir pada tahun 1961 melalui Konferensi Tingkat Tinggi pertama yang diadakan di Beograd, Yugoslavia. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara, dengan tokoh-tokoh sentral seperti Presiden Soekarno dari Indonesia, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Presiden Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Mereka berasal dari latar belakang dan kawasan yang berbeda, namun memiliki tujuan bersama: menjaga kemerdekaan politik negara mereka dan menolak untuk berpihak pada blok Barat atau Timur (Saraswati et al., 2024).

Pendekatan GNB berbeda dengan aliansi militer atau politik yang mengharuskan kesetiaan penuh. Gerakan ini berusaha menjadi ruang dialog dan solidaritas bagi negaranegara berkembang yang menghadapi tantangan kemiskinan, kolonialisme, serta tekanan geopolitik tanpa harus terjebak dalam konflik ideologis besar. Selain itu, GNB juga berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan pembangunan ekonomi yang adil, khususnya bagi negara-negara yang selama ini terpinggirkan dalam sistem internasional (Al-faiz, 2025).

Indonesia memegang peranan penting dalam kedua peristiwa bersejarah ini, baik sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika maupun sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok. Peran aktif Indonesia dalam menginisiasi solidaritas negara-negara berkembang mencerminkan komitmen negara ini terhadap prinsip kedaulatan, perdamaian, dan keadilan internasional yang hingga kini tetap menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia (Amalina, 2022).

Peran Strategis Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Indonesia memegang posisi strategis dalam pembentukan dan perkembangan Gerakan Non-Blok (GNB), sejak era Presiden Soekarno hingga masa kontemporer. Sebagai salah satu pendiri dan penggerak utama GNB, Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan poros kekuatan baru yang bebas dari dominasi dua kekuatan besar dunia—Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya, dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Hal ini diwujudkan melalui prinsip politik luar negeri "bebas aktif", yang menjadi landasan utama diplomasi Indonesia. Bebas berarti Indonesia tidak berpihak kepada salah satu blok kekuatan besar, sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia tetap berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang damai dan adil (Husein & Sudiarto, 2024).

Politik bebas aktif bukan hanya merupakan sikap netral semata, melainkan sebuah strategi diplomatik progresif yang secara aktif memfasilitasi solidaritas negara-negara berkembang dalam memperjuangkan kepentingan mereka di tengah tatanan global yang timpang. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan konsistensinya sebagai negara yang menjembatani kepentingan dunia ketiga, dengan berfokus pada isu-isu penting seperti anti-kolonialisme, non-intervensi, dan keadilan ekonomi global. Prinsipprinsip ini telah ditekankan dalam berbagai forum internasional dan diperjuangkan oleh para pemimpin Indonesia, terutama oleh Presiden Soekarno.

Salah satu tonggak sejarah yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia adalah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Konferensi ini menjadi momen krusial dalam mengonsolidasikan suara negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang berjuang untuk lepas dari kolonialisme. Indonesia, sebagai tuan rumah, menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin kawasan dan sebagai kekuatan moral yang mendorong terciptanya tatanan dunia multipolar. Pidato-pidato Presiden Soekarno dalam forum tersebut tidak hanya bersifat retoris, tetapi mencerminkan visi global yang mengakar pada nilai-nilai kemerdekaan, kesetaraan, dan solidaritas.

Konferensi ini juga menjadi cikal bakal kelahiran Gerakan Non-Blok. Pasca Konferensi Asia-Afrika, upaya membentuk aliansi negara-negara yang tidak berpihak kepada blok manapun semakin menguat. Upaya ini mencapai puncaknya dalam Konferensi Beograd 1961, yang secara resmi melahirkan GNB. Dalam forum ini, Presiden Soekarno bersama tokoh-tokoh dunia seperti Josip Broz Tito (Yugoslavia), Jawaharlal Nehru (India), Gamal Abdel Nasser (Mesir), dan Kwame Nkrumah (Ghana) menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara dunia ketiga dan menolak hegemoni kekuatan besar. Melalui kerja sama yang erat ini, Indonesia berhasil membentuk jejaring internasional yang solid dan memiliki visi bersama dalam menghadapi tekanan global (Artika et al., 2025).

Tidak hanya berhenti pada pembentukan GNB, Indonesia juga aktif menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang di berbagai forum multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan ASEAN. Dalam sidang-sidang umum PBB, Indonesia kerap mengusulkan resolusi-resolusi yang mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, menolak apartheid di Afrika Selatan, serta memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu contoh konkret adalah dukungan kuat Indonesia terhadap kemerdekaan Namibia dan Afrika Selatan dari rezim apartheid, serta peran aktif dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional.

Diplomasi Indonesia dalam GNB juga ditandai dengan pendekatan yang mengedepankan peran sebagai jembatan dialog, baik antar negara berkembang maupun antara negara maju dan berkembang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai fasilitator dan inisiator dalam menciptakan ruang-ruang diskusi yang produktif. Strategi ini semakin relevan dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan dunia kontemporer, seperti krisis iklim, ketimpangan ekonomi global, dan konflik geopolitik.

Dengan demikian, Indonesia telah menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai yang diusung oleh Gerakan Non-Blok, yakni perdamaian, keadilan, kedaulatan, dan solidaritas. Kepemimpinan moral Indonesia dalam GNB tidak hanya berdampak pada perumusan arah gerakan tersebut, tetapi juga menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam mengembangkan politik luar negeri yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan global yang lebih adil (Amalina, 2020). Peran ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan diplomatik yang diperhitungkan dalam percaturan politik internasional.

Dampak Keterlibatan Indonesia terhadap Solidaritas Global

Keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok (GNB) tidak hanya sebatas peran simbolik atau retorika diplomasi semata, melainkan berdampak nyata dan berkelanjutan terhadap solidaritas global, terutama dalam konteks negara-negara berkembang. Melalui posisi strategisnya, Indonesia berhasil menjadi penggerak utama dalam memperkuat hubungan antarnegara berkembang, yang selama ini sering mengalami marginalisasi dalam peta politik dan ekonomi dunia.

Salah satu dampak paling menonjol adalah terbangunnya kerja sama SelatanSelatan yang lebih erat dan produktif. Indonesia mendorong negara-negara berkembang untuk saling mendukung melalui berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pendidikan dan diplomasi. Dengan memfasilitasi pertukaran pelajar dan beasiswa, Indonesia membantu negara-negara anggota GNB meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka, sekaligus mempererat persahabatan dan rasa solidaritas antar bangsa. Dalam ranah perdagangan, Indonesia juga aktif memperjuangkan diversifikasi ekspor dan pengembangan industri dalam negeri negara berkembang agar tidak tergantung pada produk komoditas mentah, yang selama ini rentan terhadap fluktuasi pasar global. Ini memperlihatkan bahwa solidaritas bukan sekadar slogan, tapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang konkret (Akbar et al., 2020).

Lebih jauh lagi, Indonesia memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian berbagai konflik regional dan internasional. Melalui partisipasinya di PBB, ASEAN, dan OKI, Indonesia secara konsisten mengambil posisi moderat yang menegaskan dialog dan perdamaian. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai "lokomotif" perdamaian yang membantu meredakan ketegangan, seperti penanganan krisis di Myanmar dan konflik di Laut China Selatan. Peran ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional atau blok tertentu, tetapi juga menjembatani kepentingan bersama demi stabilitas kawasan dan dunia.

Nilai-nilai yang diusung Gerakan Non-Blok—seperti kedaulatan negara, antikolonialisme, dan keadilan sosial—terus menjadi warisan penting yang dipegang teguh Indonesia dalam menghadapi tantangan global masa kini. Solidaritas global yang dibangun sejak era GNB semakin relevan ketika dunia menghadapi ketimpangan ekonomi yang makin dalam, perubahan iklim, dan ketidakadilan dalam sistem perdagangan internasional. Indonesia menggunakan pengaruhnya di forum-forum multilateral untuk mengadvokasi posisi negara berkembang agar tidak terpinggirkan dalam pengambilan keputusan global. Misalnya, dalam perundingan perubahan iklim,

Indonesia mengingatkan dunia bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai kemampuan dan kondisi tiap negara, sehingga solidaritas tidak hanya menjadi kata-kata tapi juga tindakan nyata (Sadewa & Hakiki, 2023).

Singkatnya, keterlibatan Indonesia dalam GNB memberikan kontribusi yang sangat penting bagi penguatan solidaritas global. Indonesia membuktikan bahwa negara berkembang dapat bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Warisan nilai-nilai tersebut tetap hidup dan menjadi landasan bagi berbagai upaya diplomasi dan kerja sama internasional Indonesia hingga saat ini.

Kesimpulan dan Saran

Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok merupakan tonggak penting dalam memperkuat solidaritas global, khususnya antara negara-negara berkembang. Melalui diplomasi aktif yang berlandaskan prinsip politik bebas aktif, Indonesia berhasil menjadi penggerak kerja sama Selatan-Selatan, memfasilitasi dialog, dan memperjuangkan keadilan serta kedaulatan bangsa di forum internasional. Peran ini juga tercermin dalam upaya Indonesia sebagai mediator dalam berbagai konflik regional, yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia.

Nilai-nilai yang diusung Gerakan Non-Blok, seperti anti-kolonialisme, kedaulatan nasional, dan solidaritas, tetap relevan dan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global saat ini, seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakadilan sistem perdagangan. Warisan diplomasi Indonesia di GNB memberikan inspirasi bagi negara-negara berkembang untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di tingkat global.

Daftar Pustaka

Akbar, T. H., Subagyo, A., & Oktaviani, J. (2020). *Realisme Dalam Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Forum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok (GNB)*.

Al-faiz, A. W. (2025). *Sejarah Gerakan Non-Blok-Pilar Moderat Ke-Indonesian*.

Amalina, S. N. (2020). Integrasi ilmu sejarah dan agama: Implikasinya dalam pembelajaran. *Historis:: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *5*(1), 48–52. https://repository.uin-malang.ac.id/7208/

Amalina, S. N. (2022). Pembelajaran sejarah kebudayaan Indonesia berbasis pendidikan multikultural. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, *7*(4), 853–862. http://repository.uin-malang.ac.id/11988/

Artika, R. D., Sapphire, C. N., Putri, S. Z., Maulana, A. F. R., & Al Faruq, U. (2025). Dinasti Abbasiyah sejarah transformasi: Perkembangan ilmu pengetahuan. *DEWARUCI: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, *3*(1), 291–296. https://repository.uin-malang.ac.id/23702/

Dewanta, I. P. (2018). *Implementasi Prinsip Non-Intervensi Sebagai Asean Way Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Atas Pelanggaran Ham Di Negara-Negara Anggota*.

Husein, M., & Sudiarto, T. D. (2024). Diplomasi Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif dalam Perang Rusia-Ukraina Selama Masa Presidensi G20 di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *4*(3), 1237–1245.

Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, *11*(1), 13–28.

Saraswati, M., Marsetio, M., Rudiyanto, R., Widodo, P., Saragih, H. R. J., Kristijarso, K., & Suwarno, P. (2024). Perspektif Maritim Indonesia dalam Strategi Diplomasi dan Konektivitas Jalur Laut. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *11*(10), 4031–4041.